

ABSTRAK

Hamim Ulinnuha, NIM. 1711143025, Studi Komparatif Hukum Jual Beli Obat Setelan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Tulungagung, 2018, Pembimbing: Dr. H. Asmawi, M.Ag

Kata Kunci: Jual beli obat setelan, Kesehatan, Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini dilatarbelakangi karena banyaknya jual beli obat yang tidak sesuai dengan prosedur dan standar kelayakan obat. Jual beli obat setelan merupakan jual beli obat bagi masyarakat yang sakit yang terdiri dari beberapa obat yang diracik dan digabung menjadi satu sesuai dengan permintaan konsumen. Obat ini setalah diracik akan dikemas dalam plastik klip dan dijualbelikan tanpa adanya informasi yang tertera dalam kemasan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana jual beli obat setelan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan?, (2) Bagaimana jual beli obat setelan menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah?, (3) Bagaimana analisis komparatif jual beli obat setelan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Hukum Ekonomi Syariah?

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis jual beli obat setelan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (2) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis hukum jual beli obat setelan menurutperspektif Hukum Ekonomi Syariah (3) Untuk mendeskripsikan analisis komparatif hukum jual beli obat setelan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Hukum Ekonomi Syariah.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif. Berdasarkan segi aktifitasnya penelitian ini disebut sebagai penelitian riset kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dimana obyek penelitian biasanya digali lewat beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah dan dokumen). Teknis analisis yang digunakan adalah analisis isi, analisis deskriptif dan analisis komparatif.

Hasil penelitian ini adalah (1) Hukum jual beli obat setelan dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan itu dilarang karena karena tidak memenuhi standar kelayakan obat sehingga terdapat unsur penipuan didalamnya. (2) Hukum Jual beli obat setelan menurut Hukum Ekonomi Syariah, pertama fasad hukumnya jika dijual tanpa adanya keterangan atau informasi pada obat sehingga ada unsur gharar atau ketidakjelasan pada objeknya dan tidak diperbolehkan apabila dijual oleh pihak yang tidak paham tentang sediaan farmasi karena ditakutkan akan menimbulkan mudharat pada konsumen atas kandungan obat. Kedua, hukum jualbelinya menjadi sah apabila obat tersebut

dijual oleh pihak yang paham dengan sediaan farmasi. (3) Persamaan hukum jual beli obat setelan menurut Undang- undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Hukum Ekonomi Syariah terdapat pada tujuan kedua hukum yaitu sama-sama bertujuan melindungi umat manusia dari transaksi atau jual beli yang dilarang agama. Sedangkan perbedaan jual beli obat setelan menurut Undang- undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Hukum Ekonomi Syariah terdapat pada dasar hukum, ruang lingkup pembahasan jual beli obat setelan dan bagaimana penerapan sanksi bagi produsen atau pelaku usaha yang melanggar.

ABSTRAC

Hamim Ulinnuha, NIM. 1711143025, Comparative Study of the Law Sale and Purchase of Medicines Suits According to the Law of the Republic of Indonesia Number 36 Year 2009 on Health and Islamic Economic Law, Department of Islamic Economic Law, IAIN Tulungagung, 2018, Advisor: Dr. H. Asmawi, M.Ag

Keywords: Sale and purchase of medicine suit, Health, Sharia Economic Law.

This research is in the background because of the many drug sales that are not in accordance with the procedures and standards of drug worthiness. Buying and selling medicinal suits is a drug sale for sick people consisting of several medicines that are mixed and combined into one according to consumer demand. This medicine after formulated will be packaged in plastic clips and sold without any information contained in the packaging.

The formulation of the problem in this research are: (1) how to sell medicine of suit according to the Law of the Republic of Indonesia Number 36 Year 2009 About Health ?, (2) How to sell medicine of suit according to the perspective of Sharia Law Law ?, (3) How to comparative analysis of drug sale suit according to the Law of the Republic of Indonesia Number 36 Year 2009 on Health and Sharia Economic Law?

There are the purpose of this research are: (1) To describe and analyze the sale and purchase of drugs of suit according to the Law of the Republic of Indonesia Number 36 Year 2009 on Health (2) To describe and analyze the drug sale and purchase law according to the perspective of Islamic Economic Law (3) To describe the comparative analysis of drug sale and purchase law according to the Law of the Republic of Indonesia Number 36 Year 2009 on Health and Sharia Economic Law.

The type of research that researchersuse in this research is qualitative. In terms of its activities, this research is referred to as library research , which is research done in libraries where research objects are usually excavated through various library information (books, encyclopedias, scientific journals, newspapers, magazines and documents). Technical analysis used is content analysis, descriptive analysis and comparative analysis.

The results of this study are (1) the lawsuit drug sale law in Law Number 36 Year 2009 on Health is prohibited because it does not meet the standard feasibility of the drug so that there are elements of fraud in it. (2) The law of Sale and purchase of drugs of suit according to Sharia Economic Law, the first legal facade if sold without any information or information on the drug so that there is gharar element or obscurity on the object and not allowed when sold by parties who do not understand about pharmaceutical preparation because feared will cause mudharat on consumers over drug confinement. Second, the law of sale becomes legal if the drug is sold by a party who is familiar with pharmaceutical preparations. (3) The law of the sale and purchase of drugs of the suit according to the Law of the Republic of Indonesia Number 36 Year 2009 on Health and Sharia

Economic Law lies in the second purpose of law that is equally aimed at protecting mankind from transactions or buying and selling prohibited religion. While differences in the sale and purchase of drugs suits under the Law of the Republic of Indonesia Number 36 Year 2009 on Health and Sharia Economic Law are contained in the legal basis, the scope of the discussion of the sale and purchase of drug suit and how the application of sanctions for the producers or business actor in violation.